

RESEARCH ARTICLE

Identitas dan Keagamaan dalam Demokrasi Politik

Abdhi Jaelani[✉]

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret

✉ abdinew23@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country that has abundant diversity, including in beliefs or religions. Religion is a means of communicating with God which is considered sacred and sensitive. Because Indonesia is a country that has the right and obligation to have a religion as written in the first principle of Pancasila, Indonesia is a democratic country based on God. This means that Indonesia bases every aspect of life, especially democracy, not only on Pancasila but also on God. However, because of the sensitivity of matters related to religion in Indonesia, society is easily incited and divided. In addition, improving self-image through religion is still considered an effective way and is widely used in political democracy to attract the attention and support of the Indonesian people. Tactics in politics have many ways, varying depending on the person campaigning. There are many tactics in attracting public attention from those considered normal to quite extreme and risky methods. Starting from exploring remote areas, holding campaign concerts, providing food aid, promising their vision and mission, and many others. Although there are many ways to attract public support, the use of identity is still used in politics even though it risks division. This continues because there are no regulations prohibiting it as long as it does not violate the law.

Keywords: Democracy, Religion, Identity, Politics, Pancasila.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman melimpah tak terkecuali dalam kepercayaan atau agama. Agama adalah sarana dalam berkomunikasi dengan Tuhan yang dianggap sakral dan sensitif. Dikarenakan Indonesia adalah negara yang berhak dan wajib beragama seperti yang tertulis di pancasila sila pertama, Indonesia menjadi negara demokrasi berketuhanan. Hal ini berarti Indonesia mendasarkan setiap aspek kehidupan terutama demokrasi tidak hanya pada pancasila tetapi juga Ketuhanan. Namun karena sensitifnya hal yang berkaitan dengan agama di Indonesia, masyarakat menjadi mudah untuk dihasut dan diadu domba. Selain itu memperbaiki citra diri melalui keagamaan masih dianggap cara jitu dan banyak digunakan pada demokrasi politik untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat Indonesia. Taktik dalam politik memiliki banyak cara, bervariasi tergantung orang yang melakukan kampanye. Banyak taktik dalam menarik perhatian masyarakat dari yang dianggap biasa hingga cara yang cukup ekstrim dan beresiko. Mulai dari menyusuri wilayah terpencil, pengadaan konser kampanye, pemberian bantuan pangan,

janji akan visi dan misinya, dan banyak yang lain lagi. Meski banyak cara untuk menarik dukungan masyarakat, namun penggunaan identitas tetap digunakan dalam politik meskipun beresiko munculnya perpecahan. Hal ini tetaplah berlanjut karena tidak adanya peraturan yang melarang hal tersebut selagi tidak melanggar hukum.

Kata Kunci: Demokrasi, Agama, Identitas, Politik, Pancasila.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi berketuhanan. Hal ini selaras dengan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dimana setiap penduduk wajib dan berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Agama dianggap menjadi cara untuk berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan tersebar di seluruh penjuru nusantara telah memiliki aliran-aliran dan berpegang pada mazhab yang berbeda-beda. Mazhab adalah penggolongan, metode, jalan pikir, atau aliran dalam melaksanakan ibadah. Mazhab berbeda-beda aturan meskipun agama yang dirujuk tetap sama. Masyarakat Indonesia sangat sensitif jika bersangkutan dengan agama atau golongan mereka. Hal itu dapat memicu perselisihan antar golongan bahkan agama. Selain itu, hal ini menyebabkan mudahnya mendapat kepercayaan masyarakat atas dasar seagama atau sealiran dalam pelaksanaan politik, sehingga identitas agama masih menjadi kekuatan terkuat dalam mengambil perhatian masyarakat beragama di Indonesia. Selain agama, identitas itu bermacam-macam dapat berupa suku, ras, golongan, dan hal lain yang memiliki kesamaan atau ciri khusus. Meski menjadi perdebatan publik, identitas dalam politik tetap melekat pada sistem demokrasi di Indonesia karena juga tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi pustaka. Pemilihan metode ini berdasarkan tujuan, yaitu untuk memahami peran dan pengaruh agama pada sistem demokrasi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat realitas dan disertai dari sumber-sumber berupa artikel atau jurnal yang mendukung topik yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian disatukan dan dianalisis.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dipercaya masyarakat sebagai sistem pemerintahan terbaik karena dapat memilih atau menyuarakan pendapatnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya. Demokrasi dalam pemilu pertama kali dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 1955 saat

pemilihan anggota DPR dan anggota Konstituante, sedangkan untuk pemilihan presiden baru dilaksanakan pada tahun 2004. Hal tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia dalam kemajuan demokrasi, ikut andil dalam memilih sosok pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan setiap calon yang telah terpilih maksimal menjabat selama 2 periode baik presiden maupun kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan dan memperkecil potensi korupsi. Meskipun telah ditekan sedemikian rupa, namun korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap menjamur di badan pemerintahan. Masyarakat menjadi geram dengan penggunaan dana negara untuk kepentingan pribadi dimana dana tersebut bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat setiap tahunnya. Hal tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh pada demokrasi karena masyarakat menjadi ragu untuk memilih, selain itu sering terjadi jual beli suara atau suap-menyuap agar memilih calon yang ditentukan sehingga merusak citra dari demokrasi itu sendiri.

3.2 Praktik Pemilu di Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia melaksanakan pemilihan umum baik pemilihan presiden, wakil rakyat, atau kepala daerah setiap 5 tahun sekali. Dan yang paling baru, dilakukan pada tahun 2024 ini yang disebut pesta demokrasi rakyat terbesar. Rakyat bebas memilih calon pemimpin yang dianggap akan mewakilinya untuk membawa ke masa depan yang lebih cerah. Ketika mendekati masa-masa pemilu, calon kandidat terutama calon presiden akan melakukan berbagai taktik dalam merebut hati rakyat. Pelaksanaan taktik dalam mengambil hati rakyat ini biasanya digencarkan secara masif saat masa kampanye pemilu yang dilaksanakan menjelang hari pemilihan. Mulai dari mengunjungi tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat, mengadakan konser yang dibalut dengan kampanye, bahkan hingga blasukan ke daerah terpencil di Indonesia. Semua itu dilakukan untuk menarik perhatian rakyat Indonesia agar memilihnya di hari pemilihan kelak. Namun, tidak semua melakukan kampanye dengan cara seperti itu, ada juga yang melakukan kampanye dengan embel-embel anak dari tokoh terkenal atau dengan memanfaatkan identitasnya sebagai tokoh masyarakat bahkan tokoh agama. Hal tersebut sering terjadi terutama di wilayah yang memiliki tradisi atau agama yang kuat. Meskipun hal tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku, namun perlu digaris bawahi agar tidak terlalu mementingkan kepentingan golongannya karena Indonesai adalah negara kesatuan yang memiliki penduduk yang beragam. Jangan sampai disebabkan oleh pemilu, Indonesia menjadi terpecah-belah. Disamping hal itu, ada taktik yang melanggar peraturan yang berlaku dan telah menjadi rahasia umum tentang hal tersebut, yaitu dengan membeli atau menyuap suara. Para calon pemilih akan diberikan uang oleh seseorang agar memilih calon pemimpin yang dimaksudkan, biasanya hal tersebut dilancarkan sehari sebelum pemilihan atau bahkan pagi dini hari sebelum pemilihan dengan bahasa halus bahwa diberi uang saku dari calon kandidat, maka dari itu masyarakat memberi sebutan 'Serangan fajar'. Hal tersebut jelas melanggar peraturan dan merusak demokrasi yang adil. Meskipun melanggar peraturan, namun hal tersebut telah menjamur dan sulit untuk diatasi, tetapi hal tersebut tetap menjadi bahan evaluasi sistem pemilu yang akan dilakukan agar kedepannya dapat menciptakan demokrasi yang bersih.

3.3 Politik Identitas dan Keagamaan

Sudah tidak asing lagi ditelinga, mengenai politik identitas atau isu menjual agama dalam politik. Isu-isu tersebut selalu muncul menjelang pelaksanaan pemilu dan tenggelam seperti ditelan bumi saat pemilu telah usai. Politik identitas merupakan suatu politik yang didasarkan untuk merangkul kesamaan dari suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Politik identitas telah digunakan sejak dulu untuk kepentingan memperkenalkan diri dan menarik perhatian baik golongannya atau masyarakat. Banyak tanggapan pro-kontra mengenai hal tersebut. Selain itu isu menjual agama untuk kepentingan politik juga menggegerkan masyarakat Indonesia terutama masyarakat beragama. Penggunaan agama untuk kepentingan berpolitik menandakan ketidakmampuan berpolitik secara rasional, karena agama digunakan sebagai sarana bahkan barang dagangan, sehingga munculnya fenomena penghalalan atau pengharaman terhadap hal berbau politik.

Penerjunan orang tanpa kemampuan politik ke dalam politik maka ia akan menunjukkan atau menggunakan kemampuan lain yang ia kuasai. Sebagai contoh seorang guru, ustadz, dan preman jalanan yang sama-sama tidak memiliki kemampuan berpolitik diterjunkan ke dunia politik, mereka akan menggunakan apa yang ada seperti seorang guru memperdagangkan budi pekerti seperti yang ia lakukan kepada murid, ustadz dengan agamanya, dan preman jalanan dengan kekuatan otot dan pemalakannya.

3.4 Pandangan Masyarakat Terhadap Politik Identitas

Berbagai tanggapan masyarakat mengenai politik identitas telah tersebar baik di media sosial atau dari tanggapan yang tersebar di masyarakat. Banyak yang pro akan hal tersebut, namun tidak sedikit pula yang kontra. Sebagai contohnya ketika seorang calon bupati yang merupakan anak dari bupati setempat, hal itu menimbulkan pendapat yang beragam. Ada yang menganggap hal tersebut sah-sah saja, karena calon tersebut juga mengikuti prosedur yang berlaku, dan memang memiliki kemampuan dalam politik. Namun ada juga yang menganggap hal tersebut sebagai politik dinasti yang dimana kekuasaan suatu daerah dipegang atau dimenangkan secara terus menerus oleh suatu keluarga, dan hanya menumpang nama dari keluarga yang dianggap baik atau berhasil dalam periode sebelumnya. Selain identitas keluarga, ada juga yang menimbulkan pro-kontra panas di kalangan masyarakat, yaitu penggunaan agama. Seorang calon kandidat yang tergabung dalam suatu golongan atau aliran tertentu dan menjadi tokoh disana diisukan telah mewajibkan anak didiknya untuk memilihnya pada pemilu yang akan datang. Mereka yang tidak memilih dirinya bahkan dianggap haram atau kafir. Meskipun hal tersebut tidak dikatakan oleh calon kandidat yang bersangkutan tetapi disampaikan oleh tokoh lain dari suatu golongan tersebut, tentu hal itu menjadi perbincangan panas masyarakat terutama masyarakat yang bukan bagian dari golongan tersebut. Banyak masyarakat yang menyayangkan hal tersebut namun beberapa pendukung dari calon kandidat tidak mempermasalahkan hal tersebut dan dianggap boleh-boleh saja.

Di zaman yang serba canggih sekarang banyak digunakan kampanye berbasis digital, sebagai contoh melalui media sosial. Para pendukung fanatik calon kandidat tertentu berusaha saling menjatuhkan dan membuat citra lawannya menjadi buruk. Bahkan informasi-informasi sebelum terjun ke dunia politik pun dapat diulik kembali. Di sisi lain,

para pendukung fanatik tersebut juga tidak terima jika dukungannya yang sedang diserang. Mereka berusaha semaksimal mungkin membuat citra dukungannya menjadi baik. Sesalah apapun dukungannya, ia akan tetap membela sedangkan sebenarnya apapun lawan dukungannya, ia akan tetap menyalahkannya. Hal yang sudah termasuk ekstrim akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa apalagi jika dengan menyinggung identitas golongan, suku, ras, bahkan agama, maka permasalahan tersebut akan menjadi lebih parah dan berbahaya.

Terlepas dari taktik apa yang digunakan oleh calon tokoh politik, alangkah lebih baiknya menggunakan cara yang sehat tanpa menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Meskipun taktik yang digunakan tidak melanggar aturan yang berlaku, tetapi kerukunan dan persatuan bangsa lebih penting dibandingkan kemenangan dalam memegang bagian dari pemerintahan, seharusnya para calon wakil rakyat tahu akan hal tersebut dan juga seharusnya rakyat tahu mana yang benar-benar ingin mensejahterakan rakyat atau hanya sekedar ambisi memegang puncak tertinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan identitas sangat melekat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun hal tersebut tidak menyalahi aturan, namun tetap digaris bawahi bahwa jika digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Banyak pro-kontra yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengenai politik identitas, namun hal tersebut tetap saja dilakukan karena dianggap diperbolehkan dan menjadi salah satu cara yang efektif. Hal tersebut menandakan kurangnya keterampilan dalam berpolitik oleh calon terkait. Padahal banyak cara lain yang dianggap lebih aman untuk merebut perhatian masyarakat seperti dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi. Namun hal tersebut membutuhkan tenaga ekstra sehingga penggunaan identitas tetap menjadi cara yang dianggap lebih murah dan mudah. Masyarakat harus pandai dalam memilih pemimpin untuk masa depan mereka, jangan sampai memilih pemimpin yang hanya mementingkan diri dan golongannya saja karena Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari macam-macam suku, ras, agama, dan golongan. Jangan sampai karena memilih pemimpin yang salah, masyarakat Indonesia jadi terpecah belah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cici Frisiliawati, Suyato. (2022). Urgensi Pengetahuan Demokrasi dalam Pembentukan Sikap Demokratis. *Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, 11(4), 408-420.
- Firdaus M. Yunus, Taslim HM. Yasin, Syamsul Rijal. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2), 121-137.
- Fitria Chusna Farisa. (2022, Maret 2). Menilik Lagi Alasan Presiden RI Cuma Bisa Menjabat 2 Periode. *nasional.kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/09090901/menilik-lagi-alasan->

presiden-ri-cuma-bisa-menjabat-2-periode?page=all.

Hilman Fauzi. (2024, Maret 4). Tak Ada Isu Politik Identitas, Pemilu 2024 Berjalan Damai. *Kemenag.go.id*. <https://kemenag.go.id/nasional/tak-ada-isu-politik-identitas-pemilu-2024-berjalan-damai-hGIBd>.

Yudi Fahrian, Aidil Fitri. (2023). Demokrasi Ketuhanan (Teistik) di Indonesia : Aktualisasi Nilai Pemikiran Moh. Natsir. *JUSTICI: Fakultas Hukum Universitas IBA*, 15(2).